

DAFTAR ISI

Judul Penelitian	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Singkatan.....	viii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xiv
Pernyataan	xvi
Abstrak	xvii
Daftar Pustaka.	
Lampiran-Lampiran.	
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar belakang masalah.....	1
1.1. Rumusan Masalah.....	18
1.2. Pertanyaan Penelitian.....	24
1.3. Tujuan Penelitian.....	24
1.4. Manfaat Penelitian.....	26
1.5. Keaslian Penelitian.....	28
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1. Alur Pikir Penelitian	40
2.1.1. Politik <i>Pork Barrel</i> dalam Proses Kebijakan.....	42
2.1.2. Implikasi Politik <i>pork barrel</i> pada Kesejahteraan	44
2.1.3. Implikasi politik <i>pork barrel</i> pada perolehan suara.....	45
2.1.4. Analisis <i>pork barrel</i> politik pada keterpilihan kembali petahana.....	46
2.2. Kerangka Teori.....	47
2.2.1. Konsep politik <i>pork barrel</i> , Patronase Klientelime & Distribusi Kesejahteraan.....	47
2.2.2. Sejarah dan perkembangan Politik <i>Pork barrel</i>	64
2.2.3. Konsep Desentralisasi dan Otonomi proses Kebijakan.....	75
2.2.3.1. Desentralisasi Asimetris	75
2.2.3.2. Otonomi Proses kebijakan	87
2.2.4. Proses Kebijakan dan Politik <i>Pork barrel</i>	93
2.2.4.1. Formulasi Kebijakan.....	94
2.2.4.2. Implementasi Kebijakan	96
2.2.5. Implikasi politik <i>pork barrel</i> pada distribusi kesejahteraan.....	101
2.2.6. Implikasi Politik <i>Pork Barrel</i> pada Perolehan Suara	107
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	111
3.1.1 Lokasi Penelitian	113
3.2 Unit Analisa	113
3.3 Metode Kuantitatif	113
3.3.1 Sumber Data	118
3.3.2 Metode Sampling.....	119
3.3.3 Pemilihan Responden & Identitas Responden	119
3.3.4 Tehnik Pengumpulan Data Kuantitatif	122
3.4 Metode Kualitatif	124

3.4.1 Sumber Data	124
3.4.2 Metode memilih informan	125
3.4.3 Tehnik Analisis data Kualitatif	127
3.4.4 Teknik Pengumpulan Data	129
3.4.4.1 Data Primer	130
3.4.4.2 Data Sekunder	135
3.5 Analisis Kombinasi Kuantitatif dan Kualitatif	138
3.6 Hambatan Pengumpulan Data Kualitatif	139
3.7 Sistematika Penulisan	140
BAB IV DESENTRALISASI ASIMETRIS DIY DAN PAYUNG HUKUM POLITIK PORK BARREL	
4.1. Desentralisasi Sistem Pemerintahan Dan Otonomi Proses Kebijakan	142
4.1.1. Desentralisasi di Indonesia	144
4.1.1.1. Otonomi Khusus Aceh	147
4.1.1.2. Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat	149
4.1.2. Desentralsasi Asimetris Di DIY	150
4.1.2.1. Keistimewaan DIY	153
4.1.2.2. Model Kepemimpinan Jawa	155
4.1.2.3. Kemiskinan DIY	159
4.2 Dimensi Kultur, Sosial-Kemasyarakatan Politik Pork Barrel	161
4.3. Payung hukum politik <i>pork barrel</i> dan politik anggaran	164
4.3.1. Payung Hukum Sumber Pendanaan Politik <i>Pork Barrel</i>	170
4.3.2. Dana Keistimewaan (Danais)	171
4.3.3. Dana Perimbangan	172
4.3.4. Transformasi politik <i>pork barrel</i> kedalam mekanisme anggaran	173
4.3.5. Politik anggaran dan hak imunitas	175
Kesimpulan	178
BAB V POLITIK PORK BARREL DALAM PROSES KEBIJAKAN	
5.1. Politik <i>pork barrel</i> dalam Formulasi Kebijakan	181
5.1.1. Kemiskinan DIY dalam agenda setting aktor kebijakan	184
5.1.2. Reses	193
5.1.3. Pokok-pokok pikiran DPRD	198
5.1.4. Rencana Kegiatan pemerintah daerah (RKPD)	200
5.1.5. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	207
5.2. Implementasi politik <i>pork barrel</i> dalam skema distribusi kesejahteraan	211
5.2.1. Belanja Bantuan Sosial (Bansos)	221
5.2.2. Belanja Hibah	226
5.3. Sumber dana politik <i>pork barrel</i> tahun 2014-2019	230
5.3.1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)	230
5.3.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU)	232
5.3.3. Sumber dana keistimewaan Yogyakarta	233
Kesimpulan	234

BAB VI IMPLIKASI POLITIK *PORK BARREL* PADA OUTPUT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBANGUNAN POLITIK JARINGAN

6.1. Kinerja Pengelolaan Keuangan DIY	236
6.1.1. Pengelolaan pendapatan daerah	238
6.1.2. Pertumbuhan ekonomi DIY	241
6.2. Politik <i>pork barrel</i> dalam kesejahteraan rakyat	245
6.2.1. Perbandingan distribusi kesejahteraan terhadap tema pembangunan	247
6.2.2. Program Tematik pengentasan kemiskinan DIY	249
6.2.3. Program Tematik Kesenjangan wilayah	250
6.2.4. Distribusi program menunjang kegiatan Kemasyarakatan	251
6.2.5. Program dan anggaran sosial kebudayaan	254
6.2.6. Politik <i>pork barrel</i> dan peningkatan pendapatan masyarakat	256
6.3 Implikasi <i>pork barrel</i> pada output kebijakan kesejahteraan	258
6.3.1 Relawan dan Peningkatan kesejahteraan	260
6.3.2 Relawan dan Pemanfaatan Program Kesejahteraan	262
6.3.3 Seleksi Ketat dan target penerima program	263
6.3.3.1 Rekomendasi petahana	264
6.3.3.2 Rekomendasi relawan	265
6.3.4 Penguatan Klientalisme dalam distribusi kesejahteraan	267
6.3.5 Peningkatan Ketokohan di Daerah Pemilihan (Dapil)	269
6.3.6 Perluasan dukungan menawarkan program kesejahteraan	272
6.3.7 Ikatan ketergantungan konstituen pada petahana	273
6.3.8 Perawatan dan mempererat daya juang daerah pemilihan (Dapil)	276
6.3.9 Konsistensi dan loyalitas pemilih petahana	278
6.3.10 Penjaringan potensi pemilih baru	279
6.3.11 Model penyaluran kesejahteraan politik <i>pork barrel</i>	281
6.3.11.1 Model Claiming Program	282
6.3.11.2 Model Slot Program	284
6.4 Politik <i>Pork Barrel</i> Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Keterpilihan Kembali	288
Kesimpulan	295

BAB VII POLITIK *PORK BARREL* PADA PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA DI PEMILU 2019.

7.1. Kampanye Pemilu, Mobilisasi Dan Penjaringan Suara Pemilih	297
7.1.1. Sukses Kampanye Berbasis Program	299
7.1.1.1. Program Terdahulu	304
7.1.1.2. Program Yang Telah Disalurkan	306
7.1.1.3. Keberhasilan Program Tersalurkan	308
7.1.2. Sebaran Titik Lokasi Terima Program	312
7.1.3. Program Akan Datang	314
7.1.4. Tawaran Untuk Program Mendatang	315
7.2. Keuntungan Resiprokal Diraih	316
7.2.1. Tanggung Jawab Memenangkan Petahana	318
7.2.2. Aparatur Desa Kunci Penjaring Suara	319
7.2.2.1. Aparatur Kelurahan	321

7.2.2.2. Aparatur Pedukuhan	321
7.2.2.3. Aparatur RT/RW	322
7.2.3. Tokoh Masyarakat Alat Mobilisasi Suara	323
7.2.3.1. Tokoh Masyarakat	324
7.2.3.2. Tokoh Agama	325
7.2.3.3. Tokoh Pemuda	325
7.3. Relevansi Politik <i>Pork Barrel</i> Terhadap Perolehan Suara	326
7.3.1. Anggaran Politik <i>Pork Barrel</i> Terhadap Perolehan Suara	327
7.3.1.1. Distribusi Program Pada Wilayah Basis	328
7.3.1.2. Peruntukan Kaum Tua	331
7.3.1.3. Peruntukan Kaum Muda	332
7.4. Dinamika Pendistribusian program Di Wilayah Basis	332
7.4.1. Anggaran Program Wilayah Garapan Baru	324
7.4.2. Program Andalan Dalam Perolehan Suara	336
7.4.2.1. Program Sosial-Kebudayaan	337
7.4.2.2. Program Sarana Prasarana	338
7.4.2.3. Program Ekonomi Dan Kesejahteraan	340
7.4.3. Hambatan Program Dalam Mengkonversi Suara	341
7.4.3.1. Persaingan Atas Kampanye Caleg Lainnya	342
7.4.3.2. Blocking Vote Caleg Lain	343
7.4.3.3. Basis Massa Calon Legislatif Lainnya	344
7.4.4. Perolehan Suara Petahana Dan Penerima Program Pada Pemilu	345
7.4.4.1. Total Program Tersalurkan Di Kelurahan	346
7.4.4.2. Perolehan Suara Di Level Kelurahan	348
7.4.4.3. Total Perolehan Suara Petahana	350
7.4.5. Konsistensi Kunci Keberpihakan Pemilih	351
7.4.5.1. Efektifitas Rentang Waktu Distribusi Program	352
7.4.5.2. Periode 15 Tahun - 27 Tahun	353
7.4.5.3. Periode 10 Tahun - 15 Tahun	354
7.5. Politik <i>Pork Barrel</i> Dan Peluang Petahana Terpilih Kembali	355
7.5.1. Urgensi Politik <i>Pork Barrel</i> Dalam Pemilu	357
7.5.2. Program Pemerintah: Senjata Keterpilihan Kembali	359
Kesimpulan	361
BAB VIII POLITIK PORK BARREL PADA KETERPILIHAN KEMBALI PETAHANA	
8.1 Data reduksi petahana DPRD DIY	363
8.2 Keterpilihan Kembali Petahana	366
8.3 Perbandingan perolehan kursi partai politik	369
8.4 Petahana terpilih kembali berdasarkan Dapil	374
8.4.1 Keterpilihan Kembali petahana di Komisi dan badan Anggaran	375
8.5 Pola strategi pemenangan petahana secara umum	377
8.5.1 Tim Sukses	378
8.5.2 Basis dukungan Partai	379
8.5.3 Kegiatan partai	383
8.6 Profesionalisme petahana : Kemenangan dan kekalahan	384
8.7 Kekalahan petahana dalam pemilu legislatif 2019	392

8.7.1 Minim keterlibatan dalam proses kebijakan.....	392
8.7.2 Optimasi penyaluran program	394
8.7.3 Pertarungan internal di partai politik	397
8.8 Peluang keterpilihan dalam pandangan gender dan pendatang baru	399
Kesimpulan	402
BAB IX PENUTUP	
Kesimpulan.....	
.....	404